

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi pijakan yang penting bagi penulis dalam melakukan penelitian, mengembangkan teori, dan mengkaji isu-isu yang terkait. Dari penelitian sebelumnya, penulis menemukan artikel yang membahas tentang Masyarakat Peduli Api (MPA) oleh Pamela Dewi Widuri dengan judul "Gambaran Pemberdayaan Masyarakat Peduli Api di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah." Artikel tersebut mengulas peran pemerintah dalam mendorong pemberdayaan masyarakat peduli api, yang kemudian mendapatkan tanggapan positif dari masyarakat. Selain itu, artikel tersebut juga menginformasikan bahwa MPA di Kelurahan Kereng Bangkirai dan Sabaru didukung oleh Borneo Nature Foundation (BNF), sebuah organisasi non-pemerintah yang berfokus pada konservasi lingkungan di Kalimantan Tengah. MPA ini dibentuk untuk meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kebakaran hutan dan lahan di wilayah tersebut yang rentan terhadap bencana kebakaran. Meskipun awalnya MPA Kereng Bangkirai dinilai memiliki kinerja yang lebih baik daripada MPA Sabaru karena partisipasi aktif anggotanya, namun seiring waktu, MPA Kereng Bangkirai menghadapi tantangan internal yang mempengaruhi kinerja tim mereka. (Widuri, Qomaruddin, & Hargono, 2023)

Penelitian sebelumnya juga mengacu pada sebuah jurnal yang ditulis oleh Wilson Saputra dengan judul "Peran Kelompok Tani dan Masyarakat Peduli Api (MPA) dalam Mengelola dan Mencegah Kebakaran Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis." Dalam jurnal ini, dibahas peran yang sangat penting dari Masyarakat Peduli Api dalam pengelolaan dan pencegahan kebakaran lahan di Kecamatan Bukit Batu. Penelitian tersebut menekankan bahwa pencegahan harus fokus pada meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik yang dapat mencegah kebakaran, seperti mengganti komoditi kelapa sawit dengan nenas yang lebih aman untuk jenis lahan tersebut. Selain itu, jurnal ini juga menyoroti kerjasama yang baik antara kelompok tani dengan MPA, terutama dalam pembuatan sekat kanal, sumur bor, dan kolam penampungan air di titik-titik rawan kebakaran. Peran MPA di Kecamatan Bukit Batu dinilai sangat penting dan berhasil dalam mencegah kebakaran, yang tercermin dari penurunan titik api dan luas kebakaran di wilayah

tersebut selama tahun 2015. Kegiatan patroli lapangan, pembuatan sekat kanal, sumur bor, dan kolam penampungan air merupakan bagian dari upaya aktif MPA dalam menghadapi risiko kebakaran dengan kategori "Tinggi". (Saputra, Rosnita, & Yulida, 2018)

Penelitian selanjutnya berasal dari jurnal yang ditulis oleh Wiji Yuhana dengan judul "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran Lahan Gambut (Studi Kasus Masyarakat Peduli Api di Kecamatan Rasau Jaya, Kabupaten Kuburaya)." Penulis melakukan penelitian ini untuk mengetahui sejauh mana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Masyarakat Peduli Api (MPA), yang menjadi target khusus karena pentingnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungan. Dari kesimpulan yang diambil, hubungan antara MPA dan non-MPA dalam pencegahan kebakaran lahan menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan dan pendidikan terhadap kebakaran tidak memiliki hubungan dengan partisipasi, sementara sikap cosmopolitan berhubungan erat dengan tingkat partisipasi dalam pencegahan kebakaran lahan. Namun, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa tingkat partisipasi antara anggota MPA dan non-MPA secara keseluruhan tinggi dalam upaya pencegahan kebakaran lahan di Kecamatan Rasau. (Yuhanan & Iskandar, 2017)

Penelitian terdahulu yang juga membahas tentang Masyarakat Peduli Api (MPA) dilakukan oleh Indra Cahyadi dengan judul "Analisis Kelembagaan Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA): Studi Kasus di Desa Catur Rahayu dan Desa Janggi Baru di Provinsi Jambi." Dalam artikel tersebut, penulis melakukan analisis terhadap kelembagaan yang terlibat dalam proses partisipasi kelompok masyarakat peduli api ini. Hasil penilaian perilaku partisipan menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam upaya pencegahan dan deteksi dini, kerja sama dengan instansi lain, penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, serta pengikuti perkembangan teknologi dan informasi. Meskipun demikian, pada variabel pengelolaan dan mengusahakan dana operasional serta kegiatan pemadaman dan kebakaran hutan lahan, tingkat efektivitas perilaku partisipan MPA Adi Karya berada pada kategori efektif. (Ristianto, Damris, & Rosyani, 2021)

Dalam penelitian sebelumnya yang berasal dari jurnal yang ditulis oleh Samuel Kristiayana dengan judul "Sistem Komunikasi Radio Terpadu Masyarakat Mitra Polhut dan Masyarakat Peduli Api (MPA) di Kawasan Gunung Merapi," penulis menyimpulkan bahwa dengan adanya stasiun pelanggaran SKRT yang dapat digunakan di seluruh Kawasan Gunung Merapi tanpa mengalami

kesulitan propagasi disekeliling ketinggian gunung, SKRT bisa menjadi solusi bagi polhut/petugas dan relawan dalam menjalankan tupoksinya untuk melestarikan dan menjaga keamanan Kawasan, serta membantu dalam kesiagaan menghadapi bencana erupsi gunung Merapi. Selain itu, masyarakat mitra polhut (MPP) dan masyarakat peduli api (MPA) sebagai peserta kegiatan juga sangat antusias dengan berbagai jenis alat komunikasi dan sistem komunikasi radio terpadu. Penulis juga menarik kesimpulan bahwa peserta kegiatan tersebut sangat bersemangat untuk merubah tata cara berkomunikasi dan mengikuti kode etik komunikasi darurat.(Kristiyana, Siswanto, & Pambudi, 2022)

Dalam penelitian yang ditulis oleh Renny Candradewi Puspitarini dengan judul "Perspektif Melihat Banjir Kalimantan Selatan Tahun 2021," artikel ini membahas tentang banjir yang terjadi di Kalimantan pada tahun 2021. Banjir merupakan masalah klasik yang sering terjadi dan memiliki dampak katastrofik meskipun penyebabnya terkadang dianggap remeh. Sampai saat ini, penyebab banjir belum sepenuhnya diselidiki, dan banjir masih dipandang sebagai kejadian alamiah tanpa evaluasi yang memadai. Untuk mengurangi kemungkinan banjir di masa mendatang, penting untuk melihat banjir bukan hanya sebagai fenomena alamiah, tetapi juga sebagai hasil dari aktivitas manusia. Dengan mengubah pandangan terhadap banjir sebagai fenomena yang diakibatkan oleh manusia, penelitian dapat dilakukan untuk mengidentifikasi solusi yang terukur. Pendekatan kebijakan menjadi krusial dalam mengatasi masalah banjir, dengan menghasilkan aturan yang mengatur standar prosedur penggunaan lahan, pelestarian lingkungan, dan partisipasi masyarakat. Selain itu, kebijakan juga harus memuat pengawasan dan sanksi yang tidak diskriminatif dan adil, untuk memastikan implementasi aturan secara efektif.. (Puspitarini, 2021)

Dalam tulisan yang ditulis oleh Hayatul Khairul Rahmat dengan judul "Implementasi Kepemimpinan Strategis Guna Menghadapi Ancaman Bencana Banjir Dan Tsunami Di Provinsi Kalimantan Timur," penulis menyimpulkan bahwa Provinsi Kalimantan Timur memiliki potensi bencana yang cukup besar, seperti banjir, tanah longsor, tsunami, dan kebakaran hutan dan lahan. Dalam penanganan bencana yang sistematis, terpadu, dan terkoordinasi, pemerintah telah mengesahkan undang-undang dan peraturan daerah yang mengatur penanggulangan bencana. Konsep kepemimpinan strategis menekankan peran BPBD Kabupaten/Kota sebagai pemimpin strategis dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun sebagian besar daerah sudah memiliki BPBD, Kabupaten Mahakam Ulu masih belum

memiliki BPBD sendiri dan dibantu oleh BPBD Kota Samarinda. Dalam menerapkan kepemimpinan strategis, pentingnya koordinasi antara berbagai pihak terlibat dalam penanggulangan bencana serta kolaborasi menjadi kompetensi utama yang harus dimiliki oleh pemimpin strategis.(Knight & Weaver, 2020)

2.2 Tinjauan Pustaka

Penelitian memerlukan definisi yang relevan sebagai landasan untuk menentukan fokus pembahasan. Definisi ini disesuaikan dengan topik penelitian yang sedang diselidiki. Dengan demikian, penjelasan dasar ini menjadi fondasi yang kuat dalam pengembangan pembahasan penelitian.



2.2.1 Pengertian Mitigasi Bencana

Menurut UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, mitigasi merujuk pada rangkaian Langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari sebuah bencana. Ini dapat mencakup Pembangunan infrastruktur fisik, kesadaran Masyarakat, dan peningkatan kemampuan Masyarakat dalam menghadapi ancaman bencana. Tindakan mitigasi dilakukan sebelum terjadinya bencana, termasuk perencanaan dan pelaksanaan Langkah-langkah untuk mengurangi risiko jangka Panjang serta kesiapan dalam menghadapi bencana. Adapun bentuk upaya mitigasi bencana dapat meliputi pembangunan tanggul, sistem peringatan dini, pelatihan evakuasi, sosialisasi tata cara bertindak saat bencana, dan integrasi teknologi untuk memonitor dan mengevaluasi kondisi risiko.:

- a. Mitigasi Struktural adalah serangkaian langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana dengan membangun infrastruktur fisik dan menggunakan teknologi khusus, seperti kanal anti-banjir, sensor gunung berapi, bangunan tahan gempa, dan sistem peringatan dini tsunami. Pendekatan ini bertujuan untuk mengurangi kerentanan terhadap bencana dengan merancang bangunan yang kuat dan aman secara teknis. Bangunan tahan bencana dirancang sedemikian rupa sehingga dapat bertahan atau mengalami kerusakan minimal jika terjadi bencana, dengan mempertimbangkan karakteristik bencana dalam proses rekayasa teknis (Zakky, 2018).
- b. Mitigasi nonstruktural melibatkan langkah-langkah untuk mengurangi dampak bencana yang tidak terkait dengan pembangunan fisik. Ini meliputi pembuatan kebijakan seperti undang-undang penanggulangan bencana, tata ruang kota, pemberdayaan masyarakat, serta berbagai kegiatan lain yang bertujuan untuk memperkuat kapasitas masyarakat. Tujuannya adalah untuk melibatkan dan meningkatkan kesiapan masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana, sehingga mereka dapat merespons dan mengurangi risiko bencana secara efektif (Zakky, 2018).

Dalam penelitian yang dibahas, mitigasi nonstruktural dijelaskan sebagai serangkaian langkah yang difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat dan implementasi kebijakan yang tidak bergantung pada pembangunan fisik.